

Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang)

Veronica Yonita^{1)*}, Rina Aprilyanti²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾veronica_yonita@yahoo.com

²⁾rina.aprilyanti@ubd.ac.id

Article history:

Received 02 February 2022;
Revised 03 February 2022;
Accepted 8 February 2022;
Available online 10 February 2022

Keywords:

Good corporate governance
Transparency
Accountability
Responsibility
Independency

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada usaha kecil dan menengah khususnya pada usaha restoran/rumah makan/kafe. Dari kajian tersebut diambil lima faktor, yaitu penerapan prinsip *transparency*, penerapan prinsip *accountability*, penerapan prinsip *responsibility*, penerapan prinsip *independency*, dan penerapan prinsip *fairness*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey penyebaran kuesioner kepada para pemilik usaha restoran/rumah makan/kafe yang berada di wilayah Cikupa Tangerang yang diuji dengan pengujian asumsi klasik, metode analisis data serta analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: (1) Penerapan Prinsip *Transparency* berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada UKM. (2) Penerapan Prinsip *Accountability* berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada UKM. (3) Penerapan Prinsip *Responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada UKM. (4) Penerapan Prinsip *Independency* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada UKM. (5) Penerapan Prinsip *Fairness* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada UKM.

I. INTRODUCTION

Perubahan era yang terjadi pada abad 21 ini, penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun harus memiliki sebuah konsep *Good Corporate Governance*, meskipun dalam pelaksanaannya akan berbeda-beda. Penerapan *Good Corporate Governance* ini sendiri berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan usahanya dan sebagai bentuk tanggung jawab, serta konsekuensi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Dengan adanya beberapa prinsip umum dalam *Good Corporate Governance* seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis dapat bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Dalam arti luas *Good Corporate Governance* berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat sebagai selaku stakeholders. Perusahaan Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian nasional. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (2005-2025) dengan salah satu program strategiknya

* Corresponding author

berupa penguatan posisi UKM dengan memperbaiki akses terhadap jasa keuangan, produksi, pemasaran dan manajemen. Permasalahan Governance Corporate Governance pada umumnya ada pada manajemen/pengelola organisasi UKM. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip – prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance pada sektor UKM.

Karakteristik khusus yang umumnya melekat pada usaha kecil dan menengah (UKM) diantaranya pengelolaan perusahaan yang masih bersifat tradisional, sistem akunting dan keuangan yang sederhana, fasilitas terbatas, minimnya pengetahuan manajerial, kurangnya akses pasar, terbatasnya informasi keuangan, ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dikuasai. Pihak bank sering menghadapi kendala teknis ketika akan memberikan pinjaman, sebab masih banyak UKM yang tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memahami bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Temuan empiris (Hadiyati, et.al, 2005), bahwa sebagian besar perusahaan belum melakukan administrasi pembukuan secara benar bahkan sama skali tidak melakukan pembukuan keuangan. Kelemahan manajerial yang melekat pada kelompok UKM ini mengindikasikan bahwa UKM belum melaksanakan tata kelola perusahaan secara baik.

II. RELATED WORKS/LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Komite Cadbury (Kharisma 2014, 9) Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dan memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya pedoman serta mekanisme yang dimiliki perusahaan untuk memastikan perilaku yang baik dalam melindungi perusahaannya.

Dalam penerapannya, guna terwujudnya penerapan dari konsep Good Corporate Governance (GCG), terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang biasa dikenal dengan konsep “TARIF” (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness) (anonymous 2015, 5), konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Konsep Good Corporate Governance juga dikembangkan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yaitu suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan. Sistem disini adalah prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan, sedangkan proses itu sendiri adalah kegiatan yang dapat mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan.

Prinsip Transparency (Transparansi / Keterbukaan Informasi)

Prinsip Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan di dalam perusahaan. Menurut Muh. Arief Effendi (2016) dalam bukunya yang berjudul *The Power Of Good Corporate Governance*, mengenai prinsip Transparansi, bahwa dalam prinsip ini terdapat adanya pengungkapan atas informasi – informasi yang tidak terbatas pada informasi yang bersifat material tentang keuangan perusahaan, hasil operasional perusahaan, tujuan perusahaan dimana perusahaan bisa mengevaluasi dan mengambil langkah – langkah apa yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya, adanya keterbukaan dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak – hak mereka, misalnya seperti hak menyampaikan pendapat, hak untuk memperoleh informasi yang sejelas – selasnya, hak suara, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan, dan sebagainya. Serta isu – isu yang berhubungan dengan para karyawan maupun pihak lainnya yang merupakan asset usaha yang harus dijaga, sehingga isu – isu yang berkaitan dengan karyawan haruslah diungkapkan, yaitu hubungan antara para pemangku kepentingan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, serta hubungan – hubungan antar para pemangku kepentingan secara akurat, jelas dan tepat waktu, serta struktur maupun kebijakan yang ada di perusahaan guna mewujudkan Good Corporate Governance..

Prinsip Accountability (Akuntabilitas)

Prinsip Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Daniri, 2005) dalam Irfan Fahmi (2013, 70). Prinsip dasar Akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional.

Prinsip ini dimaknai sebagai pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi secara jelas dan transparan yang diwujudkan dalam kinerja. Akuntabilitas tentunya menjadi prasyarat dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Prinsip Responsibility (Pertanggung Jawaban)

Prinsip Pertanggung Jawaban dalam Irfan Fahmi (2013, 70) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhankebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan. Prinsip – prinsip dasar Responsibility pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peran – peran serta nilai – nilai sosial.

Dalam prinsip Responsibility perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan harus selalu mengupayakan pertanggung jawaban dengan semua para pemangku kepentingan dalam batas – batas peraturan perundang – undangan dan harus tetap mengacu kepada etika bisnis yang sehat.

Prinsip Independency (Kemandirian)

Prinsip Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Prinsip dasar Independency dalam pelaksanaan Good Corporate Governance bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Menurut Hamndani dalam buku Good Corporate Governance (2016, 76). Adapun pedoman pelaksanaan prinsip Independency di antaranya adalah sebagai berikut: masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Dalam prinsip Independency, perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Selain organ perusahaan, tidak boleh ada pihak – pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

Prinsip Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip dasar kesetaraan dan kewajaran (Fairness) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kesetaraan dan kewajaran menurut Hamndani dalam buku good Corporate Governance (2016, 76) adalah Prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan&kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas.

Prinsip dasar kesetaraan dan kewajaran (Fairness) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (conflict of interest).

Prinsip Fairness / Kesetaraan dapat disimpulkan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemangku kepentingan, seperti dalam hal semua karyawan maupun pihak lainnya harus memiliki hak suara yang sama serta dapat memperoleh informasi tentang hak suara tersebut, dan setiap perubahan dalam hak – hak suara tersebut juga harus mendapat persetujuan dari semua pihak yang ada didalamnya. Serta adanya transaksi yang di lakukan oleh orang dalam ataupun pihak – pihak tertentu dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sendiri maupun pihak tertentu harus dilarang.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antar 20-99 orang (BPS, 2004). Usaha Kecil dan Menengah telah terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, begitu juga dengan perekonomian Indonesia. UKM memiliki peran yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit – unit kerja baru. Selain itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat dan terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah.

Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah

Bagi para pelaku usaha, konsep Good Corporate Governance wajib diterapkan untuk menjamin kelangsungan usahanya, karena pada dasarnya Good Corporate Governance adalah system dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemilik perusahaan serta berbagai pihak lain yang berkepentingan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja / karyawan, pemerintah serta masyarakat luas. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan usahanya, antara lain: (1) terbukanya akses terhadap dana pinjaman, (2) terbukanya akses pasar pada skala nasional maupun internasional dan (3) terciptanya pertumbuhan UKM yang sustainable. Berdasarkan manfaat itulah kiranya cukup beralasan bahwa penerapan Good Corporate Governance harus segera dilakukan di lingkungan UKM agar iklim dunia usaha semakin membaik.

III. METHODS

Jenis Penelitian

Tipe penelitian termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2015, 14) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan. Penelitian kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari kuisioner dan data sekunder diperoleh dari buku – buku, jurnal, dan lainnya.

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik ataupun manajer yang melakukan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya restoran, rumah makan maupun kafe yang berdiri di daerah Cikupa, Tangerang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Convenience Sampling, dimana dalam hal memilih sampel dan mengambil sampel dari elemen populasi yang sesuai dengan ketentuan yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili. Selain itu, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode nonprobability sampling, karena populasi yang di teliti infinite (populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui / tidak terbatas).

IV. RESULTS

Hasil Uji Validitas

Variabel Penerapan Prinsip Transparency (X1), Penerapan Prinsip Accountability (X2), Penerapan Prinsip Responsibility (X3), Penerapan Prinsip Independency (X4), Penerapan Prinsip Fairness (X5), dan variabel Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM (Y) menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi dimana nilai r hitung di semua pertanyaan memiliki nilai yang lebih besar ($>$) dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,1966. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa secara statistik keseluruhan item pernyataan variabel yang ada pada setiap kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan di dalam penelitian.

Hasil Uji Realibitas

Uji reliabilitas data pada penelitian ini yaitu dengan cara menghitung koefisien Cronbach's Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel yang akan di teliti dengan menggunakan program SPSS versi 23. Uji reliabilitas data dapat digunakan untuk mengetahui keandalan dan kekonsistensian data pada kuesioner bila suatu pengukuran dilakukan kembali.

Pada Reliabilitas Penerapan Prinsip Transparency nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,867, pada Reliabilitas Penerapan Prinsip Accountability nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,972, Pada Reliabilitas Penerapan Prinsip Responsibility nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,789, pada Realibitas Penerapan Prinsip Independency nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,896, pada Realibitas Penerapan Prinsip Fairness nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,752, dan pada Realibitas Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,811.

Hasil pengujian realibitas terhadap semua variabel dengan cara perhitungan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa nilai Alpha $\geq 0,60$ atau hasil data yang diuji berada diatas taraf realibitas 60%. Oleh karena itu setiap variabel yang telah diuji dapat ditentukan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliable dan layak digunakan dalam menganalisis ke tahap – tahap selanjutnya.

Hasil Uji Normalitas

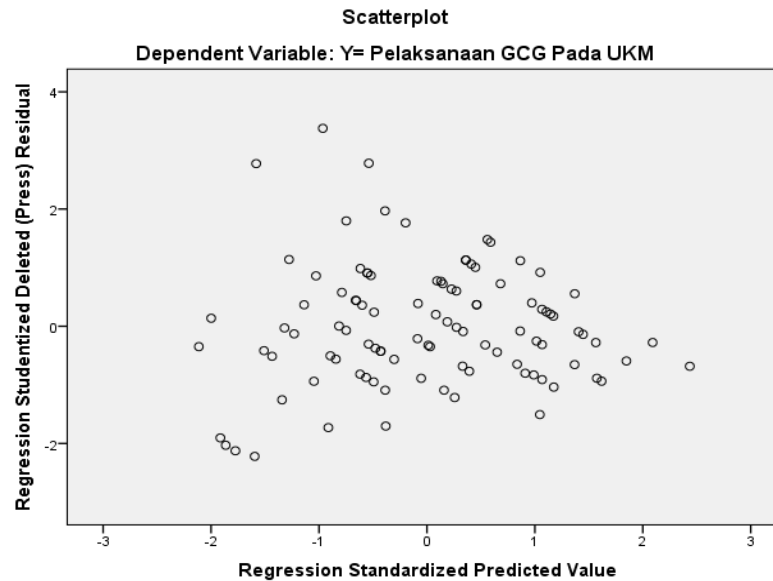
Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji yang bernama One Sample Kolmogorov Smirnov. Didalam uji normalitas ini, dilihat model regresi yang baik yaitu yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Distribusi dinyatakan normal apabila nilai p dari One Sample Kolmogorov Smirnov lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test diketahui bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,073 maka data dalam penelitian ini digolongkan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolineritas

Dalam penelitian ini uji adanya multikolineritas dilihat berdasarkan tolerance value dan variance inflation factor (VIF), dengan kriteria pengukurannya yaitu jika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak terdapat multikolineritas. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Penerapan Prinsip Transparency sebesar 1.231, Penerapan Prinsip Accountability sebesar 1.216, Penerapan Prinsip Responsibility sebesar 1.031, Penerapan Prinsip Independency sebesar 1.052, dan Penerapan Prinsip Fairness sebesar 1.119, sedangkan nilai tolerance variabel Penerapan Prinsip Transparency sebesar 0.812, Penerapan Prinsip Accountability sebesar 0.822, Penerapan Prinsip Responsibility sebesar 0.970, Penerapan Prinsip Independency sebesar 0.951 dan Penerapan Prinsip Fairness sebesar 0.893. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk menguji terjadinya perbedaan variance dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Dalam penelitian ini sebagai upaya mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas.



Gambar 1. Scatterplot

Berdasarkan hasil output diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
2. Titik – titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
3. penyebaran titik – titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik –titik data tidak berpola.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,798 atau 79,8%, hal ini berarti bahwa adanya hubungan atau korelasi antar faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM pada usaha restoran / rumah makan maupun kafe – kafe yang berada di wilayah Cikupa, Tangerang. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,617 atau 61,7% menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM pada usaha restoran dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Prinsip Tranparency, Penerapan Prinsip Accountability, Penerapan Prinsip Responsibility, Penerapan Prinsip Independency, Penerapan Prinsip Fairnes sebesar 61,7% dan sisanya sebesar 38,3% dijelaskan oleh faktor – faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Korelasi Ganda

Hasil uji analisis korelasi ganda memperoleh hasil yaitu konstanta sebesar 5,178 dengan parameter positif menunjukkan bahwa jika penerapan prinsip tranparency, penerapan prinsip accountability, penerapan prinsip responsibility, penerapan prinsip independency, dan penerapan prinsip fairnnes naik, maka Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM akan meningkat, koefisien regresi penerapan prinsip tranparency menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,306, dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip tranparency meningkatkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM. Sedangkan apabila penerapan prinsip tranparency menurun, maka akan menurunkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM, koefisien regresi penerapan prinsip accountability menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,440 dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip accountability meningkatkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM. Sedangkan apabila penerapan prinsip accountability menurun, maka akan menurunkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM, koefisien regresi penerapan prinsip responsibility menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,121 dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip responsibility meningkatkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM. Sedangkan apabila penerapan prinsip accountability menurun, maka akan menurunkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM, koefisien regresi

penerapan prinsip independency menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,007 dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip independency meningkatkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM. Sedangkan apabila penerapan prinsip independency menurun, maka akan menurunkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM, dan koefisien regresi penerapan prinsip fairness menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,007 dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip fairness meningkatkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM. Sedangkan apabila penerapan prinsip independency menurun, maka akan menurunkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada UKM.

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai Probability t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai Probability t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel Penerapan Prinsip Transparency (X1) memiliki nilai Sig. 0,000 dan variabel Penerapan Prinsip Accountability (X2) memiliki nilai Sig 0,000, kedua variabel tersebut memiliki hasil nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa variabel independent (X1 dan X2) pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah (Y), sedangkan variabel Penerapan Prinsip Responsibility (X3) memiliki nilai Sig. 0,144, variabel Penerapan Prinsip Independency (X4) memiliki nilai Sig. 0,895, dan variabel Penerapan Prinsip Fairness (X5) memiliki nilai Sig. 0,936. Ketiga variabel tersebut memiliki hasil nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel independent (X3, X4 dan X5) pada penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah (Y).

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F / ANOVA)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS versi 23, diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $32,869 > 2,31$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima, sehingga variabel penerapan prinsip transparency, penerapan prinsip accountability, penerapan prinsip responsibility, penerapan prinsip independency, dan penerapan prinsip fairness bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pelaksanaan Good Corporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah.

V. CONCLUSIONS

Penerapan prinsip transparency berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan prinsip transparency 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa penerapan prinsip transparency berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada sektor usaha kecil dan menengah.

Penerapan prinsip accountability berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan prinsip transparency 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa penerapan prinsip accountability berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada sektor usaha kecil dan menengah.

Penerapan prinsip responsibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan prinsip responsibility 0,144 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa penerapan prinsip responsibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada sektor usaha kecil dan menengah.

Penerapan prinsip independency tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan prinsip independency 0,895 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa penerapan prinsip independency tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada sektor usaha kecil dan menengah.

Penerapan prinsip fairness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada usaha kecil dan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan prinsip independency 0,936 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa penerapan prinsip fairness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada sektor usaha kecil dan menengah.

Penerapan prinsip transparency, penerapan prinsip accountability, penerapan prinsip responsibility, penerapan prinsip independency, dan penerapan prinsip fairness berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance pada sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi 0 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_0 diterima. Dengan demikian semakin tinggi penerapan prinsip transparency, penerapan prinsip accountability, penerapan prinsip responsibility, penerapan prinsip independency, dan penerapan prinsip fairness dilakukan, maka tingkat pelaksanaan good corporate governance pada usaha kecil dan menengah juga akan semakin tinggi.

REFERENCES

- Ali, H. (2017). *Penerapan Konsep Good Corporate Governance Dalam Budaya Indonesia*. Dipetik Februari 9, 2018, dari medium.com: <https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-corporate-governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df>
- Amalia, Y. (2013). *Pengaruh Peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dan Pedoman Perilaku Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada KSP Karya Niaga Kabupaten Demak*. Universitas Negri Semarang, Semarang.
- Asmorojati, D. (2016). *Analisis Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Angkasa Putra II (PERSERO)*. Dipetik Februari 11, 2018
- Dayintapinasthika. (2011). *Dayintapinasthika's Blog*. Retrieved Agustus 19, 2018, from Usaha Kecil Menengah (UKM).
- Effendi, M. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Frayogi, M. (2017). *Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) Dalam Budaya Indonesia*. Dipetik Februari 21, 2018, dari <https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-corporate-governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df>
- Gunawan, R. (2016). *Good Governance, Risk Manajement, and Compliance (GRC) Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hariyati, R., & Oliviani, O. (2013). *Pengaruh Audit Manajemen Dan Pengendalian Inter Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pt. Jamsostek (Persero) Divisi Regional VI Jawa Timur)*. Accounting Department, STIE Malangkeucewara, Malang Indonesia.
- Indriyani, R., & Rahantoknam, M. (2014). *Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. X. AGORA Vol. 2, No. 1*, dari <https://media.neliti.com/media/publications/36179-ID-analisis-penerapan-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-pada-pt-x.pdf>
- Jauhari, J. (2010). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. Journal Sistem Informasi (JSI), Vol. 2 No. 1*, 159-168.
- Jaswadi. (2016). *Analisis Tingkat Implementasi Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah. Siasat Bisnis VOL. 20 No. 2*, 16 -180. Dipetik Februari 9, 2018, dari <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/jsb>
- Kaihatu, T. S. (2018). *Good Corporate Governance dan Penerapan nya di Indonesia. Vol 8, No. 1 (2006)*. Dipetik Februari 09 2018, dari <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16505/16497>
- Maesari, M. (2015, Oktober 20). *Konsep Dasar Penelitian Kuantitatif*. Retrieved from Mayasari9595.blogspot.co.id
- Maskur, A. (2012). *Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus Pada Mitra Binaan Unit PKBL PT. Taspen (Persero)*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mukharomah, W. (2012). *Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Praktek Corporate Governance Pada Industri Kecil dan Menengah. Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 14 No.2*. Diambil kembali dari journals.ums.ac.id/index.php/benefit/articel/view/1322/884

- Nuvriasari, Audita, & Hadiyanti, U. (2008). *Governance Di Lingkungan Usaha Kecil Menengah Studi Empiris Pada Usaha Kecil Menengah di Provinsi DIY. Kajian Bisnis dan Manajemen Vol.10 No.2.*
- Tadikapury, V. (2011). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank X Tbk Kanwil X. Dipetik Februari 21, 2018
- Untung, B. (2014). *CSR Dalam Dunia Bisnis.* Yogyakarta: Andi.
- Wulansari, N., Wahyu, & Kurniawan, Y. (2017, Oktober). Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM dan Good Corporate Di Indonesia. 267